



“TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KPU”



FAUZAN YUDO WIBOWO, SE, M.ACC, AK, CIA, CA
PENGENDALI TEKNIS (AUDIT SUPERVISOR)

AUDITORAT KEUANGAN NEGARA I
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

AGENDA

Pendahuluan

Dasar Hukum Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester 2 Tahun 2017

Hal yang perlu diperhatikan

JENIS PEMERIKSAAN BPK

PEMERIKSAAN KEUANGAN

- Pemeriksaan atas laporan keuangan
- Menghasilkan opini

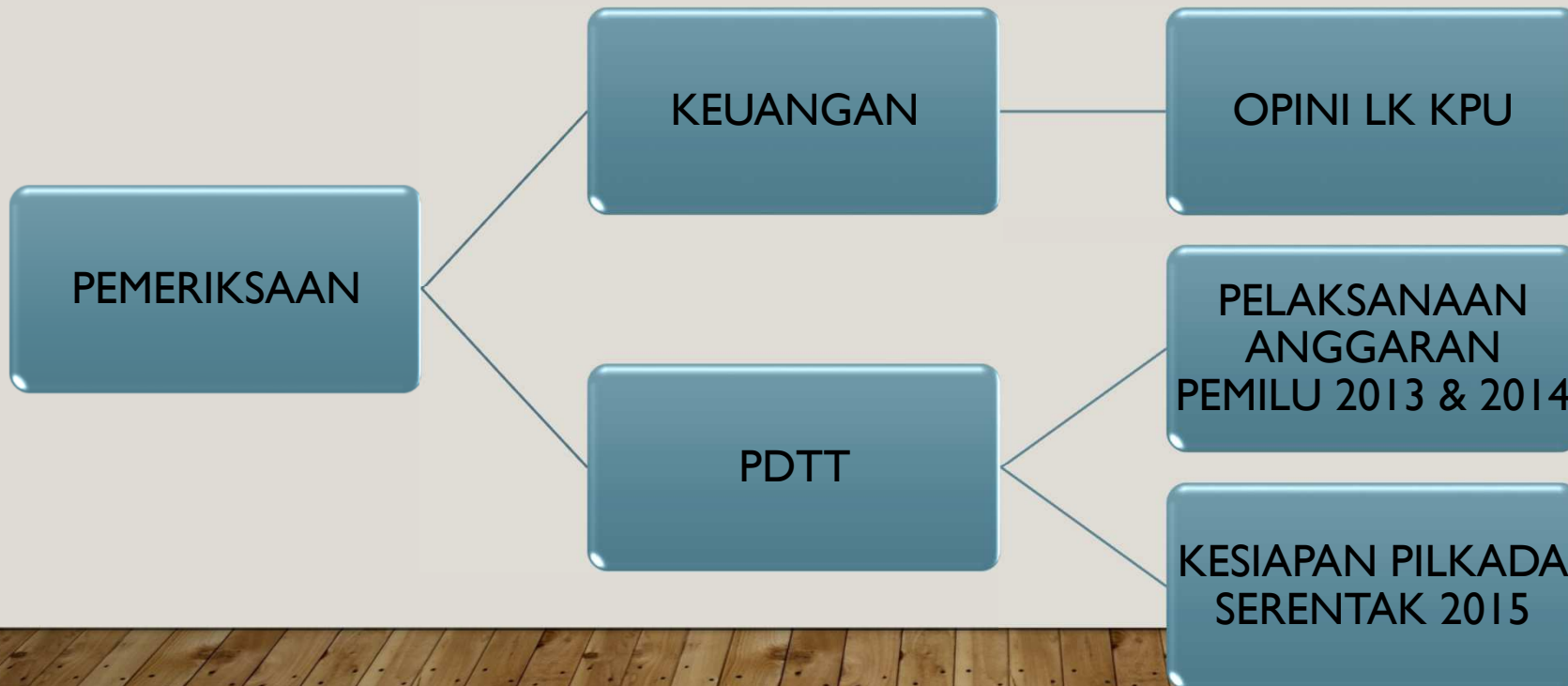
PEMERIKSAAN KINERJA

- Pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitas
- Menghasilkan Rekomendasi

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

- Pemeriksaan selain keuangan dan kinerja
- Menghasilkan Kesimpulan

PEMERIKSAAN BPK RI PADA KPU TA 2014 S.D 2017



OPINI LAPORAN KEUANGAN 3 TAHUN



2014	<ul style="list-style-type: none">• Wajar Dengan Pengecualian• Pengecualian:<ol style="list-style-type: none">1. Persediaan2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
2015	<ul style="list-style-type: none">• Wajar Dengan Pengecualian• Pengecualian:<ol style="list-style-type: none">1. Kas Lainnya dan Setara Kas2. Persediaan
2016	<ul style="list-style-type: none">• Wajar Dengan Pengecualian• Pengecualian:<ol style="list-style-type: none">1. Kas Lainnya dan Setara Kas

DASAR HUKUM



**UU NO. 15
TAHUN 2004**



**UU NO. 15
TAHUN 2006**



**PERATURAN
BPK NO. 2/2017**

DASAR HUKUM (LANJUTAN): UU NO. 15 TAHUN 2004 PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Pasal 20

- (1) Wajib menindaklanjuti rekomendasi
- (2) Wajib memberikan jawaban atau penjelasan
- (3) Paling lambat 60 hari setelah LHP diterima
- (5) Dapat dikenai sanksi administratif
- (6) Diberitahukan ke lembaga perwakilan

Pasal 21

- (1) Lembaga Perwakilan menindaklanjuti dengan pembahasan
- (2) DPR/DPRD meminta penjelasan dari BPK
- (3) DPR/DPRD dapat meminta pemeriksaan lanjutan

DASAR HUKUM (LANJUTAN)

UU NO. 15 TAHUN 2006

Pasal 8

- (1) Utk keperluan TLHP, BPK menyerahkan HP secara tertulis KEPADA Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota
- (2) TLHP diberitahukan secara tertulis OLEH Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota
- (5) BPK memantau PTL HP dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD dan DPRD serta Pemerintah

DASAR HUKUM (LANJUTAN): PERATURAN BPK NO. 2 TAHUN 2017

PELAKSANAAN TLRHP

- Kewajiban Tindak Lanjut RHP
- Disertai Jawaban & Dokumen Pendukung yg telah diverifikasi APIP
- Alasan yang Sah
- Pelaporan ke Instansi Berwenang

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLRHP

- Pelaksanaan Penelaahan TL
- Klasifikasi Penelaahan
- Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut

PENATAUSAHAAN & PELAPORAN

- Hasil: Resume PTL
- Diserahkan dalam bentuk IHPS ke DPR, DPD & DPRD
- Disampaikan pula kepada Presiden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota

PELAKSANAAN TLRHP

TL atas Rekomendasi HP

Berupa Jawaban atau Penjelasan yang didukung dokumen pendukung
Paling lambat 60 hari setelah LHP diterima

Jika tidak dapat dilaksanakan

Harus memberikan alasan yang sah

Alasan yang sah:

- (1) Keadaan kahar
- (2) Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- (3) Menjadi tersangka atau ditahan
- (4) Menjadi terpidana
- (5) Alasan sah lainnya berdasar peraturan perundangan

Jika melampaui jangka waktu

Tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa alasan yang sah
BPK dapat melaporkan ke instansi yang berwenang

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLRHP

Penelaahan Jawaban/ Penjelasan



```
graph TD; A[Penelaahan Jawaban/ Penjelasan] --> B[Klasifikasi Hasil Penelaahan]; B --> C[Resume PTL HP];
```

Klasifikasi Hasil Penelaahan

Resume PTL HP

KLASIFIKASI HASIL PENELAAHAN



KRITERIA KLASIFIKASI HASIL PENELAAHAN

**TL sesuai
rekomendasi**

- Rekomendasi telah dilaksanakan
- Bukti pendukung dan dokumen telah lengkap

**TL belum sesuai
rekomendasi**

- Ada tindak lanjut namun belum sesuai rekomendasi
- Terdapat perbedaan angka, nama dan deskripsi
- Bukti pendukung dan dokumen tidak lengkap

**Belum
ditindaklanjuti**

- Sama sekali belum ada TL atas rekomendasi
- Bukti pendukung dan dokumen tidak ada

**Tidak Dapat
Ditindaklanjuti**

- Tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai pertimbangan professional BPK

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TLRHP (LANJUTAN)

Hasil belum sesuai dan
belum ditindak lanjuti

Wajib melaksanakan
TL 30 hari setelah
sejak penetapan status
diterima entitas

Bila tidak dilaksanakan,
BPK dapat melapor ke
instansi berwenang

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Hasil

Resume PTL

Resume
Pembahasan

Dihimpun
dalam
Rekapitulasi
PTL HP

Persetujuan
Anggota BPK

Rekapitulasi
PTL HP
menjadi Bahan
IHPS

IHPS
disampaikan ke
DPR, DPD &
DPRD,
sekaligus pihak
eksekutif

SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

- aplikasi berbasis **web** yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan **tindak lanjut** secara **real time** antara **BPK dengan entitas yang diperiksa**.

mempercepat dan memudahkan komunikasi entitas dengan BPK secara reguler

pertemuan pembahasan tindak lanjut semakin minimal

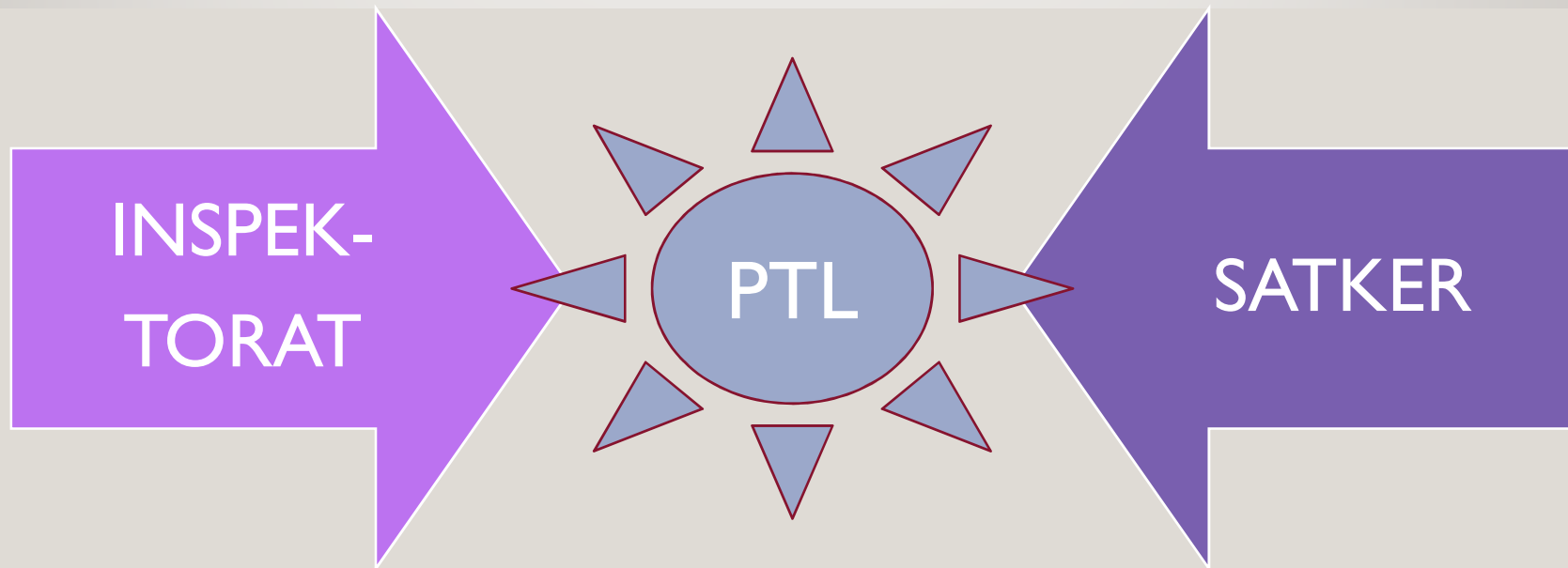
Pemantauan progress PTL secara real time online

Ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas

HASIL PEMANTAUAN TLRHP KPU SEMESTER 2 TAHUN 2017



MEMERLUKAN KOORDINASI & KERJA SAMA



JUMLAH TEMUAN DAN REKOMENDASI TAHUN 2007 S.D SEMESTER 2 TH 2017

Temuan

- 1.125 temuan
- Rp1.517.523.757.758

Rekomendasi

- 2.801 rekomendasi
- Rp743.775.589.055

HASIL PENELAAHAN PTL SEMESTER 2 TAHUN 2017

2.801 rekomendasi
Rp743.775.589.055

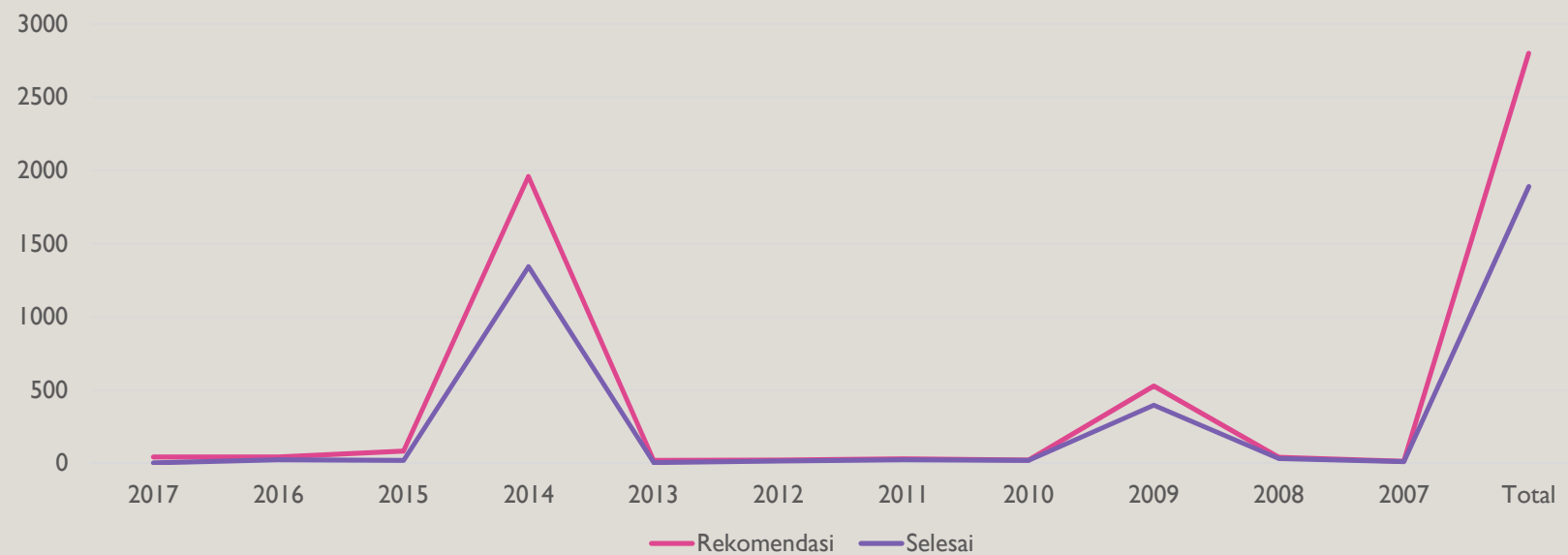
1975 telah
ditindaklanjuti
(70,51%)

652 belum
sesuai
(23,28%)

170 belum
ditindaklanjuti
(6,07%)

4 tidak dapat
ditindaklanjuti
(0,14%)

DISTRIBUSI JUMLAH REKOMENDASI PERTAHUN LHP BPK PER SEMESTER 2 TAHUN 2017



TAHUN 2014: PDTT ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU

No.	Obyek Pemeriksaan	Temuan	Nilai (Rp)	Rekomendasi	Nilai (Rp)	Telah Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindak Lanjuti	Tidak Dapat Ditindak Lanjuti
1	Prov NAD	15	1,851,240,009.71	46	1,730,914,009.71	32	6	8	-
2	Prov Sumatera Utara	24	15,088,366,479.54	52	14,576,697,074.54	23	28	1	-
3	Prov Sumatera Barat	22	642,675,640.29	38	80,395,969.43	38	0	0	-
4	Prov Riau	23	13,023,477,360.25	69	12,924,666,970.99	41	20	8	-
5	Prov Kepulauan Riau	27	3,416,699,085.00	68	3,141,178,085.00	68	0	0	-
6	Prov Jambi	13	2,423,850,863.44	51	2,383,885,863.44	46	3	2	-
7	Prov Sumatera Selatan	36	32,179,121,233.58	106	29,045,511,349.58	74	24	8	-
8	Prov Bengkulu	9	639,551,236.96	23	639,551,236.96	23	0	0	-
9	Prov Lampung	16	2,984,759,478.55	55	940,370,098.55	42	9	4	-
10	Prov Bangka Belitung	4	39,187,293.50	9	39,187,293.50	9	0	0	-
11	Prov Banten	11	31,127,632,414.47	22	30,830,455,056.67	19	3	0	-
12	Prov DKI	44	9,009,747,820.00	106	7,858,413,020.00	87	5	14	-
13	Prov Jawa Barat	14	5,687,912,536.87	30	968,004,767.32	9	21	0	-
14	Prov Jawa Tengah	24	15,869,195,541.00	48	15,775,684,214.00	42	5	1	-
15	Prov Jawa Timur	26	45,003,963,688.23	60	44,082,071,457.23	48	12	0	-
16	Prov DIY	15	2,076,547,849.68	35	1,899,690,849.68	35	0	0	-
17	Prov Kalimantan Barat	15	1,772,388,596.86	74	1,003,366,186.86	58	13	3	-
18	Prov Kalimantan Selatan	10	18,498,945,345.00	19	18,331,644,766.00	11	5	3	-

TAHUN 2014:
PDTT ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PEMILU (LANJUTAN)

[illegible]

PERMASALAHAN YANG MASIH BELUM SELESAI
PADA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

**Highlight Permasalahan Belum Seluruhnya Ditindaklanjuti
dan Belum Ditindaklanjuti**

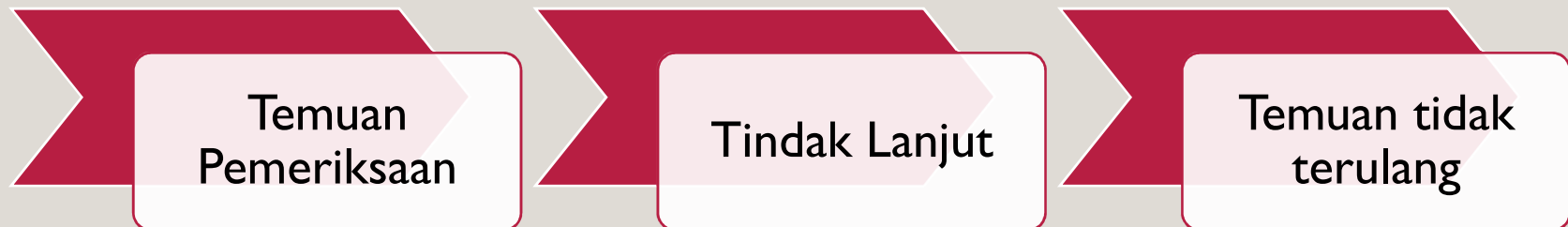
Belum seluruhnya kerugian dan pajak disetor ke kas negara

Sanksi yang belum diberikan atas kelalaian

Tuntutan Perbendaharaan belum tuntas

Belum seluruh pertanggungjawaban diverifikasi

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN YANG EFEKTIF



TEMUAN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS
(SELISIH PELAPORAN DG REKENING & BKU)

2015

• 51,79
milyar

2016

• 196,24
milyar

2017

• ?

BERBAGAI MACAM MASALAH DALAM AKUN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

- Nilai Realisasi Belanja dan Sisa Kas pada LK belum seluruhnya
- Nilai Kas tidak Riil (pencurian, & bukti SPJ belum ada SPHL/SP2HL)
- Jasa Giro dan pajak belum disetor namun tidak dilaporkan sbg sisa kas
- Nilai sisa kas Hibah Pilkada tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Selisih Kurang Kas

MASALAH ADMINISTRATIF DALAM AKUN KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Pencatatan BKU tidak ada total penerimaan hibah dan pendapatan jasa giro

Saldo kas SP2HL/SPHL tidak sama dg saldo di BKU

Bendahara tidak membuat BK Pembantu Tunai, Pajak, Uang Muka

KPA tidak menutup BKU

TEMUAN BELANJA TIDAK TERDAPAT BUKTI SPJ

2014

- KPU Provinsi Jawa Timur sebesar Rp7.145.550.289,00
- KPU Kota Samarinda sebesar Rp79.981.500,00

2016

- Pertanggungjawaban Adhoc Rp19,612 milyar

2017 (sementara)

●?

MENCEGAH TEMUAN BERULANG !!

KPU

- Sistem Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan diperkuat
- Pemilihan SDM Keuangan yang lebih berkualitas
- Keterlibatan KPA yang aktif dalam mendukung pengelolaan keuangan yang baik
- Sistem Reward & Punishment yang efektif untuk mendukung integritas dan profesionalisme yang handal & memadai
- Inspektorat diperkuat

PERHATIKAN PENGELOLAAN DANA HIBAH



YANG PERLU DIPERHATIKAN

- 1 Pedomani Kep KPU No. 88/Kpts/KPU/2016
- 2 Perhatikan aspek pertanggungjawaban keu
- 3 Perhatikan aspek pelaksanaan pengadaan barjas

ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA HIBAH PILKADA

Prinsipnya yang dipertanggungjawabkan sama dengan senyatanya

Pembukuan dengan aktivitas rekening penampungan harus terverifikasi dengan dokumen yang sah

Segala pengeluaran harus ada SPJ yang sah

Biro Keuangan agar membuat pemantauan yg handal

ASPEK PENGADAAN BARANG DAN JASA

Patuhi Peraturan Perundangan Pengadaan Barjas

Hindari penyebab kerugian dan indikasi kerugian negara seperti fiktif, pemahalan, kelebihan pembayaran dan kurang volume

Penuhi aspek kualitas akhir pengadaan barang dan jasa

TERIMA KASIH

MATUR NUWUN

SAKALANGKONG

SAUWEGHELE

EPANGGAWANG

HATUR NUHUN

SUKSEMA

MAULIATE

KURRUSUMANGA

AMANAI

TARIMO KASI